

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kewenangan pemerintah pusat kepada daerah bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi berkewajiban untuk sekedar mendukung program – program nasional. Namun, peran pemerintah daerah juga memiliki hak untuk mengambil keputusan, melaksanakan, mengatur dan mengurus kewajiban serta wewenang terlebih dalam mengatasi sebuah masalah (Said, 2012). Sesuai dengan Pasal 63 Ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim.

Melalui pendekatan Top-Down atau pendekatan dari atas ke bawah Pemerintah berkolaborasi dengan Stakeholders terkait sesuai dengan bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional sehingga menyoal keterlibatan masyarakat sebagai penerima kebijakan untuk mendengarkan, menyerap aspirasi serta berinteraksi langsung sebagai aktor yang menjalankan suatu kebijakan sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga dapat ditindaklanjuti dalam sebuah bentuk kebijakan (Hadi, K. Asworo, L. Taqwa Sihidi, 2020).

Kebijakan tersebut terdapat sebuah aturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berupa sebuah program. Program dibuat sebagai penunjang dalam sebuah kegiatan untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu rencana (Hardianzah, 2009). Kebijakan yang

diimplementasikan dalam sebuah program sebagai sebuah tahapan-tahapan yang ada dalam rangka penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan sebuah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya sebuah implementasi.

Mengacu kepada regulasi Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan upaya serta strategi untuk mengatasi dan menghadapi dampak perubahan iklim melalui sebuah tindakan yang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang disusun koordinasi antar pemangku kepentingan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan rencana strategis untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, serta dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari untuk kesejahteraan rakyat dan menuju pada pembangunan berkelanjutan melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim dan selanjutnya untuk pedoman pelaksanaan diatur oleh Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung (Wahyu Kristiningrum Lubis, 2019).

Proklam (Program Kampung Iklim) merupakan sebuah Program yang dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, upaya yang dilakukan adalah dengan cara kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan memperhatikan faktor resiko iklim dan dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi dengan menciptakan kawasan ramah lingkungan. Lingkungan yang terdapat makhluk hidup termasuk manusia didalamnya maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup satu sama lain, demi kelangsungan hidup yang sejahtera maka sebuah lingkungan harus bermanfaat bagi segi ekonomi, segi sosial dan budaya serta pariwisata bagi masyarakat (Roziqin, 2018). Sehingga sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

Masalah lingkungan yang umumnya terjadi karena diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun lingkungan adalah hilangnya sumberdaya alam seperti pencemaran air yang diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan sehingga mengakibatkan krisis air dan berdampak pada kelestarian ekosistem dan mengancam keberlanjutan dari sumber daya air (Romadhan, 2020). Polusi dari limbah berkaitan dengan masalah lingkungan yang diakibatkan dengan jumlah transportasi yang kian banyak, pembangunan yang tiada henti dilakukan seperti pembangunan industrialisasi, pembangunan pariwisata sehingga berdampak pada penumpukan sampah yang setiap pekan meningkat sekitar 10% dan akan berakibat pada kualitas air sungai yang diakibatkan oleh limbah yang masuk kedalamnya (Muhammad Kamil, 2019).

Permasalahan ini umum terjadi diberbagai kota sehingga akan menyebabkan musim hujan yang tidak normal dan juga akan menyebabkan meningkatnya permukaan

air laut dan menyebabkan banyaknya radiasi matahari yang mencapai bumi yang memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Sehingga, hubungan antara lingkungan dan manusia juga harus berkesinambungan dan berjalan dengan baik, apabila diantara keduanya tidak berjalan seimbang maka akan menimbulkan bahaya lingkungan dan akan menimbulkan suatu permasalahan.

Sehingga peran Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan guna pelestarian lingkungan hidup adalah dengan menetapkan dan melaksanakan program dan memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan serta mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup. Sesuai dengan Pemerintahan Daerah Kota Batu yang melaksanakan prinsip demokrasi, adanya peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dan memperhatikan potensi serta kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya demi kepentingan masyarakat setempat namun sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sehingga pemerintah pusat menciptakan kebijakan secara umum dan berlaku secara nasional (Negara & Negara, 2008).

Di Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti berupa Rencana Aksi Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim yang diharapkan dengan adanya program tersebut dapat mendorong masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi atau sebagai langkah untuk menyesuaikan diri

terhadap perubahan iklim dan mitigasi sebagai langkah pencegahan dalam perubahan iklim. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara sederhana yang mampu menumbuhkan kesadaran bersama di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan (Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, 2018).

Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 bahwa kampung iklim juga dapat dilaksanakan ditingkat terendah seperti rukun warga atau dusun dan tingkat tertinggi setingkat kelurahan atau desa. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Proklamasi dilaksanakan dipedesaan atau perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah dengan persyaratan umum bahwa dalam aksi local adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan minimal 2 tahun dengan kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan (Faedlulloh et al., 2019).

Penetapan lokasi kampung iklim dilakukan melalui serangkaian proses penilaian yang dilaksanakan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Di Kota Batu Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tiga sampel berdasarkan prioritas lokasi untuk pelaksanaan program kegiatan, yaitu di perkotaan dan di pedesaan, di pedesaan terdiri dari Sumber Brantas dan di Temas. Namun, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan pilihan sesuai dengan skala prioritas lokasi di Kelurahan Temas yang terdiri dari 10 RW namun tepatnya di RW.06 yaitu Kampung Ekologi. Terpilihnya Kampung Ekologi dikarenakan masyarakat disana sangat aktif dalam pengelolaan lingkungan dan potensi dikampung tersebut sesuai dengan kriteria Program Kampung Iklim.

Upaya dalam Proklamasi dilakukan melalui dua Komponen utama yang masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda sehingga dibedakan menjadi dua upaya, yaitu upaya Adaptasi dalam Program Kampung Iklim diartikan sebagai sebuah langkah

untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim melalui beberapa langkah seperti: (1) Pengendalian kekeringan, (2) Peningkatan ketahanan pangan, sedangkan Mitigasi dalam Program Kampung Iklim diartikan sebagai sebuah langkah untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dilakukan dengan cara: (1) Pengelolaan sampah, limbah padat maupun cair, (2) Budidaya pertanian organik.

Dalam pengaplikasian kegiatan Program Kampung Iklim juga dilaksanakan bersama Pokja (Kelompok Kerja). Hal ini dilaksanakan karena harus adanya support dari berbagai instansi untuk kemajuan pelaksanaan program tersebut. Kelompok kerja yang terlibat dari berbagai instansi adalah (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan dengan melakukan pembinaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kampung iklim yang mayoritas dikendalikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai instansi pembantuan dalam kesiapan siaga bencana, (3) Dinas Pertanian melalui pemanfaatan lahan dan (4) Dinas Pengairan dan Bina Marga dalam masalah drainase.

Dengan adanya instansi terkait ini bertujuan sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah serta memantau dalam kemajuan pelaksanaan program dan berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak baik melalui Kelompok masyarakat tani, PKK, Perangkat Desa/ Kelurahan atau Dusun/RW dan juga Organisasi Pemuda.

Sebagai sebuah program yang dibuat sebagai langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim maka dalam penerapan program yang telah dijalankan dengan adanya dasar hukum yang jelas inilah peneliti akan melihat sejauh mana implementasi dari sebuah tindakan dalam dinamika pelaksanaan tersebut telah dijalankan dan meraih dampak yang diinginkan, kemudian

peneliti juga ingin melihat sejauh mana capaian target dari program kampung iklim melalui kampung ekologi.

Masyarakat sebagai penggerak sehingga keterlibatan antara peran pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai akibat dari dekonsentrasi yang harus melaksanakan kebijakan di daerah mempunyai kewajiban dan wewenang dalam pembinaan melalui kampung yang diusulkan dan memberikan sosialisasi dan masyarakat Kelurahan Temas sebagai subyek dalam berjalannya program untuk bersama – sama meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan tersebut guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Program Kampung Iklim merupakan program masyarakat yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim secara berkesinambungan. Sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang saling berkaitan dan bukan keputusan yang berdiri sendiri, sehingga melalui kebijakan yang akan menghasilkan sebuah regulasi bukan saja hanya mencakup undang – undang bidang tertentu saja, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan, petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, dan bersangkutan paut dengan proses pelaksanaan yang dampaknya menjangkau dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Turunan sebuah kebijakan nantinya juga akan menghasilkan sebuah program yang dibuat untuk menunjang sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah program yang sesuai dengan yang diinginkan maka program dalam penerapannya harus tepat sasaran demi mengatur kehidupan

bersama yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan (Taufiqurokhman, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green ?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan ini secara teoritis menggunakan fokus salah satu kajian mata kuliah prodi Ilmu Pemerintah bidang “Kebijakan Publik” pemilihan tersebut akan mampu memberikan sumbangsih dan

wawasan terhadap keilmuan di salah satu lokus kajian Kebijakan Publik, yaitu Implementasi Program Kampung Iklim (Proklam) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green

- b) Memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentang studi kebijakan, khususnya terkait Implementasi Program Kampung Iklim (Proklam) yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta beberapa kriteria kampung yang dapat diikutsertakan untuk mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal dalam rangka menjaga pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan Studi Kasus di RW.06 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.

2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan yang lebih dikhususkan untuk ilmu yang diperoleh sewaktu masih menempuh kuliah yaitu mata kuliah “Kebijakan Publik”. Sehingga dapat sebagai bahan masukan bagi manfaat yang ditujukan kepada Kampung Ekologi di Kota Batu sebagai salah satu kampung yang terpilih untuk mengikuti Program Kampung Iklim sehingga penelitian ini berguna untuk perbaikan atau rekomendasi dalam pengoptimalan Kampung Ekologi guna membangun kawasan ramah lingkungan.

3) Manfaat Akademis

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan

- b) Sebagai bahan referensi bagi penelitian/kajian tentang Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Iklim Ekologi Batu Into Green

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai prespektif dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dalam penelitian diantaranya adalah :

1) Implementasi Program

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang akan menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dilaksanakan akibat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Sedangkan Implementasi Program sebagai langkah dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari program itu sendiri. Menurut pandangan Charles O. Jones :

“Implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Yang didalamnya mencakup tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, (a) Pengorganisasian struktur organisasi, (b) Interpretasi para pelaksana, (c) Penerapan atau pengaplikasian”(Ii & Teori, 2007).

Sehingga implementasi program merupakan turunan dari sebuah kebijakan. Yang didalamnya terdapat penerapan dari sebuah bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai

diikuti dengan aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui dan sesuai dengan strategi pelaksanaan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga diharapkan dapat menjadi arah bagi kebaikan rakyat guna meningkatkan kehidupan rakyat itu sendiri. Dan dengan adanya program maka dalam sebuah perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan dan tingkat keberhasilannya dapat diukur.

2) Kampung Iklim

Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

“Pelaksanaan Proklamasi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa sesuai dengan kondisi geografi dalam suatu wilayahnya yang dilaksanakan dengan syarat minimal 2 tahun telah berjalan dan masyarakat sebagai penggeraknya” (Sun et al., 2017).

Sehingga dalam penerapan program kampung iklim, harus dilaksanakan sesuai dengan kriteria pelaksanaan, tidak semua kampung dapat menjadi kampung iklim. Mengingat terdapat kriteria didalamnya dan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam keterlibatannya. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan menunjang dalam berjalannya kegiatan program kampung iklim. Sesuai dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan Program Kampung Iklim adalah bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang adil dan merata serta menghargai budaya local serta keberlanjutan ekologi melalui ekosistem yang seimbang.

2) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Adaptasi merupakan sebuah tindakan dengan menyesuaikan diri dalam mengatasi pengaruh buruk iklim nyata. Hal ini dilakukan dengan cara membangun strategi dengan memanfaatkan peluang – peluang yang menguntungkan. Tujuannya adalah untuk meringankan dampak buruk terhadap perubahan iklim. Menurut UNFCCC (United Nation Framework for Climate Change Convention) :

“Adaptasi merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. Sedangkan mitigasi sebagai upaya mengurangi terhadap dampak perubahan iklim. UNFCCC sebagai salah satu lembaga internasional terus mencari upaya-upaya dan tindakan untuk menanggapi dampak perubahan besar yang membawa dampak besar terhadap masyarakat dunia dan sumber kehidupannya, serta menggalang dukungan untuk mengatasi perubahan iklim, dilakukan dengan cara membangun strategi dengan memanfaatkan peluang – peluang yang menguntungkan” (Aldrian et al., 2011).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh krisis lingkungan. Dilaksanakan melalui program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial sebagaimana diilustrasikan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya upaya penurunan dan pencegahan emisi namun hal ini juga menjadi lingkungan sebagai kawasan ramah lingkungan.

4) Ekologi Politik

Ekologi berkaitan dengan perilaku manusia yang mengarah kepada sifat serta dampak yang ditimbulkan melalui hasil interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar yang mencakup keseluruhan system dalam hal ini ekologi dikaitkan dengan kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan yang selalu bersifat dinamis dan selalu berkembang. Menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa Ekologi adalah:

“Sebuah tata hubungan yang bersifat menyeluruh dan mempunyai timbal balik yang berguna antara suatu organisme dan lingkungan sekitarnya yang juga memiliki pengaruh timbal balik antara makhluk hidup maupun dengan benda organik” (KRISTIYANTO, 2016).

Hal ini muncul melalui hasil interaksi melalui lingkungan sekitar. Terlebih manusia sebagai subjek yang tidak berhenti berinteraksi dengan lingkungan terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam disekitar, sehingga lambat laun hasil atau dampak yang ditimbulkan akan menjadi pokok masalah yang terus berkembang dan berubah atau yang bersifat dinamis. Sehingga keberadaan ekologi harus seimbang agar kualitas tanah, air, maupun udara dapat terjaga serta berdampak bagi kehidupan manusia.

1.6 Definisi Operasional

Merupakan unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana caranya mengukur variable. Hal ini berkaitan dengan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan data atau indikator yang merujuk pada konsep. Definisi operasional berasal dari turunan rumusan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan dengan mengambil indikator sebagai penilaian yang akan dibahas pada

pembahasan. Maka, pada penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan variable terbagi menjadi dua sub pokok yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Ekologi Batu Into Green

- 1) Pelaksanaan Program dengan Kelompok Sasaran dalam Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Ekologi Batu Into Green
- 2) Organisasi Pelaksana Program dalam Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Ekologi Batu Into Green
- 3) Kelompok Sasaran Program dengan Capaian yang ditentukan dalam Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Ekologi Batu Into Green

1.6.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) Pada Kampung Ekologi Batu Into Green

- 1) Perubahan Sebagian Pola Pikir serta Komitmen Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan
- 2) Bantuan Fisik untuk Melengkapi Sarana-Prasarana

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu pertama adalah cara ilmiah yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan bersifat rasional, empiris, dan sistematis, kedua berupa data yang valid, ketiga penelitian mempunyai tujuan yang bersifat penemuan, pengembangan, dan pembuktian.

Kegiatan penelitian secara umum akan menggunakan hasilnya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dapat dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan sebuah informasi yang ingin diteliti. Kegiatan ini merupakan sebuah langkah yang akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang terdiri dari :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Model jenis deskriptif ini saya rekomendasikan dalam merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dengan tujuan, dan tingkat kealamiahannya obyek yang diteliti oleh peneliti. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data berasal melalui uraian berupa kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang penerapan Program Kampung Iklim (Proklam), manfaat serta kendala dalam penerapan program Proklam untuk mengetahui dampak yang dihasilkan oleh adanya Program Kampung Iklim. Peneliti mengambil studi di RW.06 Kampung Ekologi Kelurahan Temas sebagai kampung yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

2) Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan kelengkapan sumber data merupakan hal yang penting diperhatikan penulis guna menghasilkan pemahaman hasil yang tepat. Oleh sebab itu responden yang menjadi subjek penelitian tugas akhir yaitu :

1. Kepala atau Pegawai Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
2. Lurah di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu

3. Ketua RW 06 Kampung Ekologi Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu
4. Pengurus Kampung Ekologi RW.06

3) Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu jelas pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistika.

a. Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan berupa sumber data primer, karena sumber data untuk tugas akhir yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Untuk pengumpulan data dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan di Kampung Ekologi sebagai narasumber informasi yang dibutuhkan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung untuk memperoleh data.

b. Sekunder

Sumber data untuk tugas akhir sekunder yang saya gunakan untuk mendukung data primer dalam bentuk pengumpulan data yang saya targetkan dari hasil wawancara seperti, dokumen, jurnal, buku, dan internet maupun hasil penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang berkaitan dengan judul ini.

4) Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode/teknik kualitatif dimana sumber utama yaitu wawancara dilakukan dengan membawa interview guide dengan tujuan agar tidak menyimpang dari permasalahan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui interview (wawancara) dalam penelitian dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan. Serta dilaksanakan melalui observasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti serta ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam melalui wawancara tidak terstruktur yang berarti bebas peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam pedoman wawancara hanya mengacu pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan jawaban yang diperoleh dengan wawancara kemudian direkam dan dirangkum oleh peneliti sesuai dengan subyek yang dituju sebagai narasumber (Sugiyono, 2017).

2. Observasi

Observasi dalam teknik pengumpulan data sebagai cara yang tidak terbatas pada orang, namun pada obyek-obyek alam yang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan apabila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala dalam alam dan bila responden yang diamati tidak begitu luas (Sugiyono, 2017).

5) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang dituju untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Batu sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No.507
- b. Kampung Ekologi RW.06 di Jl. Patimura Gang 5 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai tujuan kampung yang telah diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam Program Kampung Iklim.

6) Analisis Data

Analisis data sering dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Nasution (1988) dikutip melalui Prof. Dr. Sugiyono bahwa :

“ Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan sebuah masalah, baik dilakukan sebelum terjun ke lapangan, ataupun berlangsung terus sampai penulisan mendapatkan hasil penelitian” (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penelitian merangkum, memilih hal-hal dan memfokuskan pada hal-hal yang mengenai pengembangan kampung ekologi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Program Kampung Iklim. Dengan demikian nantinya data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

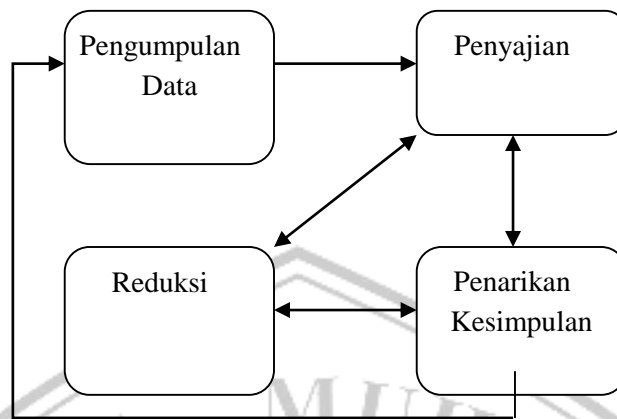
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan program kampung iklim.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian teks, tabel, foto, dan bagan. Penelitian melaksanakan pengamatan dan memahami peran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, di Kampung Ekologi RW.06 di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu untuk memperoleh data baik berupa tabel, foto, maupun bagan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penulisan laporan tugas akhir, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian lapangan dilaksanakan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian tugas akhir ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan lapangan dengan teori-teori yang digunakan.



Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber : (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017)

